

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah (Otonomi Daerah) yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut baik otonomi dengan penuh harapan. Oleh karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, pengelolaan keuangan daerah atau penetapan APBD kini sepenuhnya merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah, walaupun ada sumber pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus). Oleh sebab itu pengelolaan dana perimbangan juga menjadi wewenang pemerintah daerah dan perundang-undangan yang berlaku (Nuralam, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah identik sekali dengan yang namanya anggaran. Anggaran sendiri mencerminkan beberapa hal yaitu, yang pertama maksud dan tujuan dari permintaan dana tersebut, yang kedua biaya dari program yang diusulkan, dan yang ketiga data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program (Keuangan Daerah, 2012). Definisi lain dari anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam

ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Djaja, 2015). Organisasi pemerintahan merupakan salah satu lembaga non profit, yang didirikan untuk kepentingan masyarakat. Instansi pemerintah didirikan untuk melayani masyarakat umum baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Instansi pemerintah sepenuhnya dikelola oleh negara, termasuk dalam hal pembiayaannya. Maka penggunaan dana dalam sebuah instansi harus diawasi secara optimal.

Untuk anggaran yang sudah disalurkan di kantor daerah atau kantor pemerintah lainnya harusnya sesuai dengan perencanaan yang ada. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Penganggaran ini juga harus diukur dan diawasi apakah sudah sesuai dengan *standart* dan tujuannya.

Berikut penulis menyajikan data mengenai penurunan anggaran dimulai dari tahun 2019 hingga ke tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Lampung penurunan ini memiliki selisih yang begitu jauh hingga ada pengurangan pendapatan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Tidak hanya dibagian pendapatan saja namun dibagian pembelajaannya juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan pembelanjaan sekitar > Rp 1.000.000.000 sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan hingga diangka > Rp 10.000.000.000.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung**

Uraian	Anggaran	Anggaran	Anggaran
	2019	2020	2021
	Rp		
<b>A. Pendapatan</b>	<b>900.529.052,00</b>	<b>70.707.500,00</b>	<b>20.685.000,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA</b>	900.529.052,00	70.707.500,00	20.685.000,00
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	900.529.052,00	70.707.500,00	20.685.000,00
2 Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah _LRA	-	-	-
<b>B. Belanja</b>	<b>1.570.053.923.630,00</b>	<b>1.609.570.750.533,00</b>	<b>2.817.949.918.423,52</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.290.823.307.260,00</b>	<b>1.289.049.407.297,00</b>	<b>205.903.894.604,00</b>
1 Belanja Pegawai	944.155.419.150,00	933.266.111.360,00	1.011.295.250.460,45
2 Belanja Barang Dan Jasa	346.667.888.110,00	355.783.295.937,00	1.380.606.523.141,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>279.230.616.370,00</b>	<b>320.521.343.236,00</b>	<b>220.144.250.218,07</b>
1 Belanja Modal Tanah	-	5.208.075.000,00	-
2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	138.512.023.135,00	165.652.233.776,00	119.019.118.060,00
3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	95.980.264.320,00	104.901.374.150,00	29.783.033.017,00
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	125.895.000,00	1.960.000.000,00	-
5 Belanja Modal Aset tetap Lainnya	44.612.433.915,00	42.799.660.310,00	71.342.099.141,07

Sumber : <https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/>

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung**

Uraian		Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
		2019	2020	2021
		Rp		
<b>A. Pendapatan</b>		<b>262.235.000,00</b>	<b>13.896.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA		262.235.000,00	13.896.000,00	7.150.000,00
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	262.235.000,00	13.896.000,00	7.150.000,00
2	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah _LRA	-	-	-
<b>B. Belanja</b>		<b>1.491.619.821.674,00</b>	<b>1.577.433.532.996,63</b>	<b>2.811.579.411.828,42</b>
Belanja Operasi		<b>1.255.298.297.088,00</b>	<b>1.285.695.509.059,63</b>	215.174.713.637,27
1	Belanja Pegawai	925.146.608.017,00	981.484.277.857,00	995.893.198.729,00
2	Belanja Barang Dan Jasa	330.151.689.071,00	304.211.231.202,63	1.388.440.208.124,92
Belanja Modal		<b>236.321.524.586,00</b>	<b>291.738.023.937,00</b>	<b>212.071.291.337,23</b>
1	Belanja Modal Tanah	-	3.632.712.750,00	-
2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	97.174.348.252,00	146.996.871.869,77	27.407.222.431,00
3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	94.795.387.019,00	104.462.371.946,00	112.892.948.191,23
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.364.000,00	1.954.295.950,00	
5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	44.252.425.315,00	34.691.771.421,23	71.771.120.715,00

Sumber : <https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/>

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwasannya realisasi anggaran rata - rata dari *planning* anggaran yang sudah ditetapkan, namun pada tabel realisasi anggaran tetap saja jumlah dari pendapatan dengan pembelanjaan masih lebih besar

pembelanjaan dibandingkan pendapatan.

Dari tabel diatas adalah sebuah fenomena yang membuat penulis tertarik untuk meneliti laporan anggaran dinas Pendidikan Lampung dari sudut efektivitas dan Efisiensi. Ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai analisis anggaran ini dibarengi dengan peneliti terdahulu yang meneliti penelitian yang sejenis yaitu meneliti mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pada penelitian (Djaja, 2015) dalam penelitian yang berjudul analisis efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung terhadap anggaran berbasis kinerja pada kantor kecamatan pemekasan, dengan hasil penelitian tersebut yaitu rasio efektifitas mencapai 100%. Kemudian perbandingan rasio efektifitas penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2010 menunjukkan bahwa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%.

Pada penelitian (Dwi Nofita Sari, 2018) dengan judul Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja memiliki hasil Teori yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja adalah analisis dan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2014 masuk dalam kriteria cukup efektif, dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif, dikarenakan realisasi

anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tapi tidak direalisasikan secara efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dikategorikan efisien.

Pada penelitian (Nuralam, 2018) dengan judul Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran Pada Kantor Bupati Enrekang dengan hasil meningkatnya hasil persentase dalam efektivitas penggunaan anggaran pada tahun 2014 sebesar 49,06%, tahun 2015 sebesar 54,03%, tahun 2016 memiliki rasio efektivitas 59,91% hal ini merupakan sebuah peningkatan yang baik dalam penggunaan anggaran dari pemerintah.

Penelitian diatas dapat disimpulkan ada ketidak konsistenan efektivitas penggunaan anggaran yang bahkan sudah diawasi sekalipun oleh badan pengawas daerah. Namun jika dilihat dari penelitian sebelumnya instansi yang tidak konsisten dalam penggunaan anggaran merupakan instansi daerah dan bersifat non edukasi.

Dari adanya ketidak konsistenan efektivitas penggunaan anggaran pada instansi non Pendidikan, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas dan efisiensi anggaran pada instansi Pendidikan yang berlokasi di Lampung dengan judul berikut **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran (Studi Kasus Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah menggambarkan masalah, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Penggunaan Anggaran untuk mencapai efektif pada instansi Dinas Pendidikan Lampung.
2. Penggunaan Anggaran untuk mencapai efisiensi pada instansi Dinas Pendidikan Lampung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berisi pokok masalah yang diteliti dan diambil dari masalah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Penggunaan anggaran telah mencapai efektif pada instansi Dinas Pendidikan Lampung ?
2. Apakah Penggunaan Anggaran telah mencapai efisien pada instansi Dinas Pendidikan Lampung ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan tersendiri baik bagi penulis maupun bagi subjek peneliti, berikut beberapa tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah dalam penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan Lampung telah mencapai efektivitas
2. Untuk mengetahui apakah dalam penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan Lampung telah mencapai efisien.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Anggaran pada instansi Dinas Pendidikan Lampung telah efektif dan efisien dalam penggunaannya.

### 2. Manfaat Praktisi

#### a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu, pengetahuan dan pengalaman mengenai penggunaan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Lampung.

#### b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai pedoman dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan anggaran dan reaslisasi anggaran untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pada Dinas Pendidikan Lampung

#### c. Bagi Pimpinan Dinas Pendidikan Lampung

Untuk memberikan sebuah kesempatan bagi mahasiswa yang ingin meneliti analisis penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan Lampung untuk mencapai efektivitas dan Efisiensi penggunaan dananya. serta sebagai bentuk referensi bagi dinas Pendidikan lampung bahwasannya

dinas tersebut telah terbuka untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai anggarannya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar akuntansi Pemerintahan (Pemerintah Daerah, 2005). Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Standar akuntansi pemerintah adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum, (Nurema, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (Pemerintah Daerah, 2010). Berdasarkan Kemenkeu Nomor 13 Tahun 2006 yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan *computer* (Kemenkeu, 2006)

### **2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintahan atau yang bisa disebut dengan Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kelompok dibandingkan dengan sektor 11 swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi laba non pemerintahan dan organisasi non laba non pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah lainnya seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik dan lain sebagainya) (Rusdi, 2018). Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintah (Pemerintah Pusat, Kementrian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, harus mengikuti standar pemerintah (SAP) seperti dimaksudkan dalam UU No 17/2003 Pasal 32 Tentang Keuangan Negara (Kemenkeu, 2003), UU No 1 tahun 2004 Pasal 51 ayat (3) Tentang Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah, 2004).

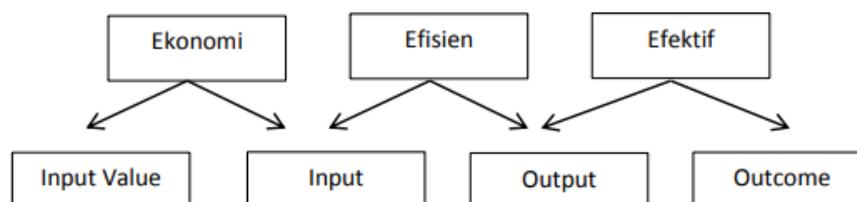
### **2.1.2 Value For Money (VFM)**

Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money (VFM)* dalam menjalankan aktivitasnya. *VFM* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektif". Ekonomi adalah perolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan

nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Gambar 2.1

Konsep *Value For Maney (VFM)*



Sumber : *digilibadmin.Anggaran.co,id*

## 2.2 Efektivitas

### 2.2.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara cermat dan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemampuan dari setiap perangkat kerja baik perangkat kerja manusia maupun bukan manusia yang dapat melahirkan suatu hasil yang maksimal yang digunakan sesuai tujuan yang diharapkan. Efektivitas yakni bahwa Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya). Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Kata efektif menjadi efektivitas adalah pencapaian prestasi yang sebesar-besarnya dari suatu kegiatan melalui suatu produktivitas kerja, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan melalui perencanaan sebelumnya. Menyatakan efektivitas adalah suatu kegiatan terbaik antara usaha dengan hasilnya, antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai untuk suatu tujuan, yaitu :

1. Hasil disini dimaksudkan adalah suatu pekerjaan dapat disebut efektif kalau dengan usaha tertentu dapat memberikan hasil yang maksimal mengenai mutu atau jumlah satuan hasil itu atau dengan kata lain terjaminnya kualitas dan kuantitasnya.
2. Dalam usaha, maksudnya adalah suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika suatu hasil tertentu tercapai suatu tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan.  
(Syamsuriadi, 2016)

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan yang menekankan pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi di mana efektivitas merupakan kunci dari kesuksesan suatu organisasi. (Natasya Bella Safira Marpaung, 2021)

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Tolak ukur efektivitas yang dimaksud akan digunakan untuk meneliti seberapa efektifkan anggaran yang sudah disalurkan untuk pemerintah daerah.

**Tabel 2.2.1**  
**Kriteria Efektivitas**

<b>Efektivitas</b>	<b>Persentase Efektivitas</b>
Tidak Efektif	0% - 25%
Kurang Efektif	25% - 50%
Efektif	50% - 75%
Sangat Efektif	75% - 100%

### **2.2.2 Efektivitas Penerapan Standart Akuntansi**

Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pisat tanggung jawab dengan tujuannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No.60 tahun tahun 2008, pasal 1 no.1).

### **2.2.3 Indikator Efektivitas Dinas Pendidikan Prov. Lampung**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Nurema, 2020). Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan lebih. Efektivitas hanya melihat suatu program atau

kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan rumus rasio untuk mengukur tingkat efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Nurema, 2020)

**Tabel 2.2.3**  
**Tingkat Efektivitas**

<b>Efektivitas</b>	<b>Persentase Efektivitas</b>
Rendah Sekali (tidak efektif)	0% - 25%
Rendah (kurang efektif)	25% - 50%
Sedang (efektif)	50% - 75%
Tinggi (sangat efektif)	75% - 100%

Sumber: (Nurema, 2020)

### 2.3 Efisiensi

Pengertian efisiensi secara umum merupakan suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang Efisiensi = *Realisasi Anggaran Belanja/Target Anggaran Belanja x 100%*, digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan efisien. Dengan defenisi lain efisiensi yaitu suatu proses yang dilakukan untuk membandingkan serta mengukur masukan dan keluaran. Dalam hubungannya dengan cara yang paling produktif untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka. Suatu perusahaan mungkin secara teknologi lebih efisien dari yang lain kalau perusahaan tersebut

memproduksi tingkat output yang sama dengan satu atau lebih sedikit input fisik. Karena proses produksi yang berbeda tidak semua perusahaan efisien secara teknologi". Dari penjelasan di atas maka disimpulkan efisiensi merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Yuliana, 2013).

Pengukuran efisiensi ataupun Analisis tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Anggaran belanja yang dimaksud disini adalah total belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berikut merupakan rumus untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Nurema, 2020)

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Efisiensi**

<b>Efisiensi</b>	<b>Persentase Efisiensi</b>
Rendah Sekali (tidak efisien)	0% - 25%
Rendah (kurang efisien)	25% - 50%
Sedang (efisien)	50% - 75%
Tinggi (sangat efisien)	75% - 100%

Sumber: (Nurema, 2020)

Secara efisien yang berarti anggaran diminimalkan untuk mencapai lebih banyak manfaat dalam setiap proyek anggaran langsung pada Dinas Pendidikan Lampung (belanja dengan baik). Mengenai tingkat efektifitasnya, mengimplementasikan anggaran langsung dan harapannya dapat

mengimplementasikan proyek dan program yang terkait dengan anggaran langsung disesuaikan dengan harapan dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Lampung

## **2.4 Anggaran Dan Realisasi Anggaran**

### **2.4.1 Definisi Anggaran**

Anggaran dapat didefinisikan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, baik perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun bertujuan non laba (Natasya Bella Safira Marpaung, 2021). Anggaran (*Budgeting*) merupakan alat perencanaan, pedoman, pengendalian dan alat pengawasan dibidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non – laba. Dengan menggunakan anggaran maka perkembangan perusahaan/instansi akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan/instansi tersebut ada dukungan aktif, baik dari pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah (Lilly Ibrahim, 2020).

Dalam hal ini anggaran dirumuskan untuk organisasi secara keseluruhan ataupun sub unit, di mana anggaran merupakan suatu prosedur yang disebut *budgeting sistem*. Anggaran sangat identik dengan keuangan dan perencanaan, yang mana definisi dari perencanaan sendiri yaitu upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah langkah – langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Perencanaan dalam arti sempit merupakan *derivate* dari kemampuan *foresight* yaitu kemampuan mengukur (*measuring*). *Budgeting* merupakan rencana kegiatan yang terperinci ditetapkan sebagai suatu pedoman pelaksanaan dan sebagai suatu dasar penilaian

terhadap prestasi kerja manajer. Selain mencakup ramalan atau perencanaan mengenai pendapatan dan pengeluaran penerimaan dan biaya untuk mempermudah proses perencanaan ini sendiri, maka semua kegiatan operasi dari perusahaan yang menyusun anggaran harus dikonversikan kedalam bentuk kesatuan nilai uang. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur dalam alat kesatuan yang sama (Syamsuriadi, 2016).

Untuk anggaran yang sudah disalurkan di kantor daerah atau kantor pemerintah lainnya harusnya sesuai dengan perencanaan yang ada. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Penganggaran ini juga harus diukur dan diawasi apakah sudah sesuai dengan *standart* dan tujuannya. Pengukuran kinerja (tolak ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan /program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja (Djaja, 2015).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan perencanaan yang dikembangkan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan tanggung jawabnya kepada publik, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat ukur dan

tanggung jawab kinerja pemerintah.

#### **2.4.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam (Undang-undang No. 32, 2014), Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Dalam pengertian lain APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja PEMDA dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik” (Rusdi, 2018). Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan pemikiran dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyerahkan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik melakukan pembedaan krusial antara penambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran, dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Jenis anggaran sektor publik, adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD *Budget of state*
- b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik & swasta. Menurut *National Comitte On Governmental Accounting (NCGA)* yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*.

Di definisikan anggaran (*budget*) yaitu, Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Pendapatan daerah adalah “hak

daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah penerimaan kas dari sumber pendapatan tersebut telah memenuhi definisi pendapatan, karena

- (1) Ada penerimaan uang oleh pemerintah daerah (direkening kas umum daerah);
- (2) Penerimaan tersebut merupakan hak pemerintah daerah untuk menerimanya;
- (3) Uang yang sudah diterima tersebut tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah daerah” (Rusdi, 2018).

### **2.4.3 Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah harusnya digunakan sebagai mana perencanaan yang sudah dibuat. Anggaran yang akan dijelaskan mengenai anggaran masalah perencanaan anggaran belanja rutin sebagaimana yang disampaikan oleh (Widjaya, 2003), dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Berikut kesimpulan mengenai penetapan penggunaan anggaran rutin, sebagai berikut :

1. Suatu rencana yang sudah disyahkan
2. Rencana bagian dari pada rencana keseluruhan yang berupa anggaran.
3. Kalkulasi dari pembiayaan kegiatan pemerintah.

Dengan fungsinya yang demikian itu, maka rencana anggaran adalah perkiraan untuk waktu yang akan datang disusun berdasarkan perjalanan- perjalanan masa lalu dan masa kini. Penyusunannya yang sistematis haruslah dilakukan atas dasar klasifikasi anggaran yang digunakan. Untuk lebih jelasnya klasifikasi anggaran yang dimuat maka terlebih dahulu dijelaskan dalam berbagai macam klasifikasi

anggaran, dalam anggaran sebagai klasifikasinya meliputi :

1. Klasifikasi obyek
2. Klasifikasi organik
3. Klasifikasi fungsional
4. Klasifikasi ekonomi
5. Klasifikasi program performance.

Dari pengertian klasifikasi obyek pengelompokkan pengeluaran - pengeluaran ke dalam jenis barang jasa yang akan dibeli. Sedangkan untuk klasifikasi organik adalah pengelompokan anggaran atas kategori suatu organisasi. Klasifikasi Fungsional adalah merupakan salah satu pengelompokkan pengeluaran atas dasar fungsi-fungsi yang akan dijelaskan oleh Mardiasmo, dalam bukunya Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ekonomi adalah pengelompokkan pengeluaran atas dasar kelompok kegiatan fungsi dan proyek yang akan dicapai sehingga dari pengeluaran - pengeluaran anggaran nantinya dapat diukur efisiensi dan penegasan yang dapat dijalankan. Dengan mengetahui macam-macam klasifikasi anggaran tersebut di atas, dengan data yang ada dapatlah ditentukan perencanaan anggaran belanja rutin pada lokasi penelitian yang terpilih disusun berdasarkan dengan sistemasi sebagai dasar dalam pertimbangan klasifikasi anggaran yang sesuai.

#### **2.4.4 Pelaksanaan Penggunaan Anggaran**

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah menganut sistem pengurusan yang sama dengan sistem pengurusan keuangan negara yang pada pokoknya yaitu:

1. Pengurusan administrasi, yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan -

tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang membawa akibat pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran daerah. Pengurusan ini terdiri dari tindakan otorisator (penandatanganan SP2D) dan tindakan ordonator (penandatanganan SPM).

2. Pengurusan ke pemegang kas, yaitu wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang, serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Pengurusan ini dilaksanakan oleh pemegang kas daerah dan pemegang kas.

Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jurnal (Nuralam, 2018). sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah”

Tujuan dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah (APBD) meliputi :

1. Tanggung jawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran.
4. Hasil guna.
5. Pengendalian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah.

## **2.5 Pendapatan**

### **2.5.1 Defenisi Pendapatan**

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan dalam satu periode. Pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi antara lain penjualan barang, jasa, penggunaan aktiva perusahaan, pihak lain yang menghasilkan keuntungan, royalti dan deviden. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang dan jasa yang di jual. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan. Menurut Hery (2013:26) dalam jurnal (Nurema, 2020) pendapatan merupakan arus aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, penerima barang, pemberian jasa atau aktiva lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Secara konseptual pendapatan dapat diartikan aliran masuk aktiva atau pengurangan hutang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan (Nurema, 2020).

## **2.6 Belanja Daerah**

Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah". Belanja daerah dapat dikelompokkan kedalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian jenisnya, belanja operasi terdiri dari; belanja pegawai, belanja

barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi; antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangna pemerintah daerah. Fungsi dari APBD ini sendiri yaitu :

1. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,
2. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan,
3. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektif perekonomian.
5. Fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Alur dalam penyusunan APBD yaitu APBD disusun sesuai kebutuhan

penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah, sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikut sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD. Pemerintah daerah membahas bersama DPRD prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun selanjutnya. Pembahasan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan

undangundang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya.

### **2.5.2 Tujuan penyusunan pendapatan**

Tujuan prosedur penyusunan pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
2. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan.

### **2.7 Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya: sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan

serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dan laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. Pengertian laporan keuangan menurut peraturan menteri keuangan, “laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”. Dari kedua pernyataan diatas, dilihat adanya perbedaan pada komponen laporan keuangan. Pada laporan keuangan non konvensional terdapat laporan yang dinamakan laporan laba rugi, laporan tersebut berfungsi sebagai tolak ukur kinerja perusahaan, sedangkan pada laporan keuangan pemerintah pusat tidak terdapat laporan laba rugi, hal ini dikarenakan pemerintah tidak berorientasi pada profit, tetapi didalam laporan keuangan kementerian Negara/ lembaga ada laporan yang memperlihatkan jumlah anggaran yang diotorisasikan dengan realisasinya, laporan ini disebut realisasi anggaran. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk mengetahui dan menganalisa keadaan dari suatu perusahaan dan dari hasil analisa disebut dapat diperoleh keputusan yang tepat (Lilly Ibrahim, 2020).

## **2.8 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode”. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Adapun tujuan penyusunan laporan

realisasi anggaran yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan dan memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas dalam belanja.

Adapun manfaat penyusunan laporan realisasi anggaran menurut, (Keuangan Daerah, 2012) yaitu, dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber - sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

## 2.9 Peneliti Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dengan kesimpulan hasil mengenai anggaran pada instansi pemerintah. Beberapa hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2. 9**  
**Peneliti Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Perbandingan</b>
1	Muhammad Herman Djaja,	Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran	Perbandingan rasio efektifitas	Pada instansi Kanto camat Pemekasan

	2015	Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Pemekasan	penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2010 menunjukkan bahwa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%.	Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%.
2	Dwi Nofita Sari, Dkk, 2018	Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja	Teori yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja adalah analisis dan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015	Efektivitas Anggaran pada instansi dikota samarinda efektif pada tahun 2011,2012,2013 dan 2015. Serta kurang efektif pada tahun 2014. Untuk tingkat efesiensinya sudah efisien.

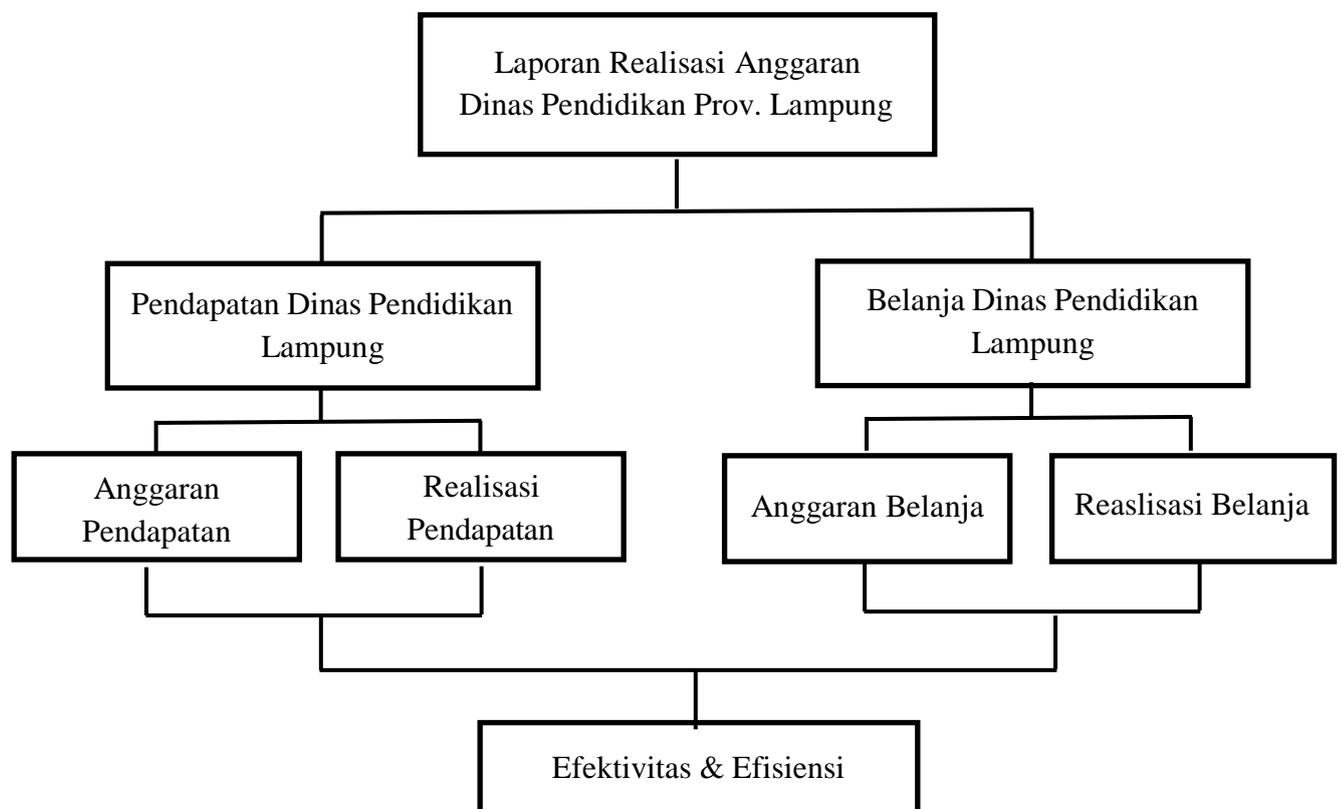
			<p>bervariasi. Dimana pada tahun 2014 masuk dalam kriteria cukup efektif, dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif, dikarenakan realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tapi tidak direalisasikan secara efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dikategorikan efisien</p>	
3	Firman Alimuddin, 2021	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Penggunaan data dilakukan melalui dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas berdasarkan pada metod <i>evaluate for money</i>. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan</p>	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan rasio ekonomi <i>Value for money</i>

			anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efektif dan efisien	
4	Ariel Sharon Sumenge, 2013	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan	Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah efektif. BAPPEDA Minahasa Selatan menilai ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Pelaksanaan anggaran Belanja BAPPEDA Tahun 2008 – 2012, secara	Efektivitas anggaran pada kantor BAPPEDA Minahasa selatan kurang efektif namun pada tahun 2011 efektif. Untuk tingkat efisiennya sudah efisien.

			keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2012 dikategorikan efisien.	
5	Nurema, 2020	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang T.A 2015-2019 dikatakan efektif dengan presentasi masing-masing sebesar 97,17%; 93,55%; 94,58%; 93,12%; dan 91,83%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi anggaran belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang T.A 2015 dikategorikan cukup efisien dengan persentase 87,18% berada pada predikat 80%-90% sedangkan untuk tahun 2016-2019 dikatakan kurang efisien dengan presentasi masing-masing sebesar 90,48%; 90,22%; 92,65%; dan 90,16%.	Efektivitas pada kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten engkarang T.A 2015-2019 sudah efektif dan efisiensinya juga dikateogrikan efisien.

## 2.10 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hasil sintesis, abstraksi, dan ekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah yang mencerminkan paradigma penelitian. Artinya kerangka konseptual didasarkan pada tinjauan pustaka yang telah disampaikan pada bab II. Kerangka konseptual ini dibuat untuk melihat gambaran penelitian mengenai pengawasan anggaran terhadap efektivitas pada Dinas Pendidikan Lampung tahun 2021. Kerangka konseptual ini berisi, hubungan faktor dan variabel yang terkait dengan masalah penelitian. Kerangka konseptual penelitian dapat berbentuk bagan, model matematik atau persamaan fungsional yang dilengkapi dengan narasi atau penjelasan isi kerangka konseptual dan beberapa sumber penelitian yang dijalankan penulis dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.10 Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi, Objek, Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Lampung. Data diperoleh dari *website* [Lampungprov.go.id](http://Lampungprov.go.id)

##### **3.1.2 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran Dinas Pendidikan Lampung.

##### **3.1.3 Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari pengajuan judul penelitian, perancangan sistem informasi akuntansi hingga penyusunan laporan penelitian adalah Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022.